
ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA TOKOH POLITIK INDONESIA DALAM BERKOMUNIKASI DI JEJARING SOSIAL DIGITAL

Parulian Sibuea¹, Alvira Mutiara Chairunisa², Farhana Shahira³, Dea Miranti
Hajiriah Manurung⁴, Hummairoh⁵.

^{1,2,3,4,5} Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: paruliansibuea@uinsu.ac.id¹, alvira0506242115@uinsu.ac.id²,
farhana0506242168@uinsu.ac.id³, mirantihajiriah0506243239@uinsu.ac.id⁴,
hummairoh0506242133@uinsu.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kesantunan dan pelanggaran kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh tokoh politik Indonesia di jejaring sosial digital, serta bagaimana penggunaan bahasa tersebut mencerminkan strategi pencitraan dan pembentukan identitas politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari unggahan media sosial para politisi seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan lainnya, melalui teknik simak bebas libat cakap dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah, alih kode, dan gaya bahasa tertentu menjadi strategi untuk membangun kedekatan dengan publik. Di sisi lain, ditemukan pula pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesantunan berbahasa, khususnya dalam konteks debat politik, seperti pelanggaran maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesetujuan. Fenomena ini menegaskan peran penting media sosial sebagai ruang komunikasi politik yang strategis sekaligus menantang dalam menjaga etika berbahasa. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan komunikasi politik yang lebih etis dan berbudaya di era digital.

Kata kunci: identitas politik, kesantunan berbahasa, media sosial, strategi komunikasi, tokoh politik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of politeness and violations of language politeness committed by Indonesian political figures in digital social networks, as well as how the use of language reflects imaging strategies and the formation of political identity. Using a descriptive qualitative approach, data was collected from the social media uploads of politicians such as Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, and others, through free listening and documentation techniques. The results showed that the use of regional languages, code switching, and certain language styles became a strategy to build closeness with the public. On the other hand, there were also violations of the principles of politeness of language, especially in the context of political debate, such as violations of the maxims of tact, generosity, humility, and consent. This phenomenon confirms the important role of social media as a strategic political communication space as well as challenging in maintaining language ethics. The findings are expected to be a contribution in the development of more ethical and cultured political communication in the digital age

Keywords: political identity, language politeness, social medias, communication strategy, political figures.

PENDAHULUAN

Berkomunikasi dapat diartikan menjadi sebuah kegiatan manusia dalam menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Dalam berkomunikasi, ada hal-hal di luar teknis bahasa yang diperhatikan oleh penuturnya, seperti gaya bahasa, makna, status, dan juga kesantunan (language politeness).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, telah merevolusi cara interaksi sosial dan politik di Indonesia. Platform seperti Facebook, X, dan Instagram tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang publik yang vital bagi para aktor politik untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat (Alam, 2021). Kemampuan media sosial dalam menyebarkan informasi secara cepat, efisien, dan dengan segmentasi yang tepat, memberikan kekuatan besar dalam memengaruhi opini publik dan menggalang dukungan (Alam, 2021). Fenomena ini menandai babak baru dalam komunikasi politik, di mana

politisi dituntut aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui media digital untuk mengonstruksi citra yang baik (Alam, 2021).

Dalam ranah komunikasi politik, bahasa memegang peranan sentral sebagai alat utama untuk menyampaikan gagasan, visi, dan misi para tokoh politik (Ruslan, 2015). Bahasa bukan lagi sekadar medium netral, melainkan sebuah representasi relasi politis dan wadah bagi kekuasaan tertentu (Khak, 2021). Pilihan bahasa dapat dianggap sebagai praktik kekuasaan yang membawa nilai ideologis tertentu dan dapat dianalisis secara menyeluruh (Fairclough, dalam Amir, 2013). Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun, jelas, dan lugas sangat penting untuk memastikan pesan politik dapat diterima dengan baik dan dipertanggungjawabkan (Ambarsari dkk., 2024). Gaya bahasa yang digunakan oleh seorang politisi dapat mencerminkan watak individu dan kapabilitasnya (Ambarsari dkk., 2024).

Namun, di tengah era digital yang serba terbuka ini, muncul fenomena pelanggaran kesantunan berbahasa di media sosial yang cukup serius (Aziz, 2021). Berbagai penelitian menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang tidak santun, seperti cemoohan, penggunaan kata-kata kasar, sindiran, kritik langsung, hingga serangan terhadap kepribadian (Nainggolan dkk., 2024). Analisis terhadap debat calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 menunjukkan adanya pelanggaran maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, dan maksim kesetujuan (Setiyaningsih & Suharyo, 2025). Kasus seperti polemik pernyataan Megawati mengenai ibu-ibu pengajian yang dinilai menyinggung, menegaskan bagaimana pemilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan kontroversi dan konflik (Pratiwi, 2024; Fadlilah dkk., 2023).

Padahal, kesantunan berbahasa merupakan aspek pragmatik yang esensial dalam membangun komunikasi yang harmonis dan efektif, terutama dalam konteks interaksi politik (Setiyaningsih & Suharyo, 2025). Kesantunan tidak hanya berkaitan dengan bahasa verbal, tetapi juga perilaku nonverbal (Yanda, 2017). Seorang politisi yang santun dalam berbahasa akan dinilai berwibawa dan mampu mendengarkan aspirasi rakyat (Setiyaningsih & Suharyo, 2025). Namun, ketika pelanggaran kesantunan terjadi, hal ini berpotensi merusak citra politisi dan bahkan memicu perpecahan di masyarakat (Setiyaningsih & Suharyo, 2025).

Melihat urgensi fenomena ini, penelitian mengenai analisis kesantunan berbahasa tokoh politik Indonesia di jejaring sosial digital menjadi krusial. Penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang memengaruhinya (Setiyaningsih & Suharyo, 2025), serta menganalisis bagaimana penggunaan bahasa tersebut membentuk identitas politik tokoh politik tersebut (Fadlilah dkk., 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika komunikasi politik digital di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang hal ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi para praktisi politik dan masyarakat umum, dalam upaya membangun budaya komunikasi yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya (Nainggolan dkk., 2024).

KAJIAN PUSTAKA

Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa mengacu pada penggunaan strategi linguistik untuk menunjukkan pertimbangan dan rasa hormat kepada orang lain dalam komunikasi, yang bertujuan untuk menjaga interaksi sosial yang positif dan menghindari konflik. Kesantunan berbahasa mencakup penggunaan bahasa yang dapat diterima secara sosial dan mempertimbangkan perasaan orang lain, yang sering kali memperhalus keterusterangan atau memperhatikan dinamika kekuasaan (Mahmudi et al., 2021).

Aspek-aspek utama kesantunan berbahasa adalah:

1. Menunjukkan pertimbangan: Bahasa yang sopan menunjukkan bahwa Anda menghargai dan menghormati perasaan dan sudut pandang orang lain.
2. Meminimalkan ancaman muka: Hal ini melibatkan penggunaan strategi untuk menghindari mengatakan hal-hal yang dapat dianggap tidak sopan, memalukan, atau mengancam “muka” orang lain (citra diri di depan umum).
3. Menggunakan bahasa yang tepat: Kesopanan dapat bervariasi dalam berbagai budaya dan konteks sosial. Apa yang dianggap sopan dalam satu situasi mungkin tidak sopan dalam situasi lain. Contohnya adalah: Menggunakan frasa seperti “tolong”, “terima kasih”, “permisi”, atau melunakkan permintaan dengan frasa seperti “bisakah Anda” adalah contoh bahasa yang sopan.

Kesantunan berbahasa ini menjadi sangat penting karena:

1. Interaksi sosial yang positif: Bahasa yang sopan menumbuhkan hubungan yang positif dan membantu menciptakan suasana yang nyaman untuk berkomunikasi.
2. Menghindari konflik: Dengan memperhatikan perasaan orang lain, bahasa yang sopan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan pertengkaran (Nasution et al., 2023).
3. Membangun kepercayaan dan hubungan baik: Menggunakan bahasa yang sopan dapat membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat.
4. Mencerminkan karakter: Beberapa orang memandang kesopanan sebagai cerminan karakter dan nilai-nilai seseorang, yang menyoroti pentingnya menggunakan bahasa yang efektif dan penuh perhatian.

Pada intinya, kesantunan berbahasa adalah aspek penting dari komunikasi yang efektif yang lebih dari sekadar menyampaikan informasi. Kesantunan berbahasa melibatkan penggunaan bahasa secara strategis untuk membangun hubungan yang positif, menghindari konflik, dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain (Nasution, 2019).

Komunikasi

Komunikasi adalah konsep yang luas yang mencakup pertukaran informasi, ide, atau perasaan, dan bahasa adalah alat khusus yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran ini. Bahasa adalah sistem simbol yang terstruktur, termasuk kata-kata dan kombinasinya, yang memungkinkan terjadinya transfer makna. Meskipun bahasa merupakan komponen penting dalam komunikasi, bahasa bukanlah satu-satunya cara untuk berkomunikasi, karena isyarat non-verbal dan metode lain juga berperan (Maisarah, 2013).

Bahasa sebagai sebuah sistem, baik lisan, tulisan, maupun isyarat, menyediakan cara terstruktur untuk menyampaikan makna melalui sistem simbol dan aturan. Komunikasi sebagai proses dimana komunikasi menjadi proses berbagi informasi yang lebih luas, dan dapat melibatkan berbagai metode, termasuk bahasa, isyarat non-verbal (seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah), dan bahkan penggunaan teknologi (Pohan & Fitria, 2021).

Bahasa berfungsi sebagai alat, hal ini bahwa bahasa berfungsi sebagai alat utama untuk berkomunikasi, memungkinkan manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain. Meskipun bahasa sering dikaitkan dengan komunikasi verbal, komunikasi juga mencakup elemen non-verbal seperti gerak tubuh, nada suara, dan bahkan cara seseorang berpakaian.

Bahasa dan komunikasi sangat terkait dengan interaksi sosial dan konteks budaya (Pohan & Fitria, 2021). Cara kita berkomunikasi, termasuk bahasa yang kita gunakan, dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan latar belakang budaya kita.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan

untuk menjelaskan fenomena kebahasaan secara mendalam, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa oleh tokoh politik di media sosial. Sumber data berasal dari unggahan (postingan) di media sosial seperti Instagram, X, dan Facebook. Data dikumpulkan dari akun-akun tokoh politik Indonesia maupun dari akun-akun berita, termasuk Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Megawati Soekarnoputri dan tokoh politik Indonesia lainnya.

Objek analisis meliputi penggunaan bahasa (seperti bahasa Jawa, alih kode, campur kode), representasi kekuasaan melalui diksi dan kalimat imperatif, serta berbagai gaya bahasa (misalnya klimaks, metafora, sarkasme). Penelitian juga mengidentifikasi pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dan strategi kesantunan yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan catat (Setiyaningsih & Suharyo, 2025; Azizah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis terhadap penggunaan bahasa oleh tokoh politik Indonesia di media sosial mengungkapkan pola komunikasi yang kompleks, mencerminkan tidak hanya strategi pencitraan tetapi juga tingkat kesantunan yang bervariasi dalam interaksi mereka dengan publik. Penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi beberapa bentuk penggunaan bahasa, representasi kekuasaan, gaya bahasa, serta strategi kesantunan yang diterapkan oleh para aktor politik di platform digital.

a. Konstruksi Identitas Politik melalui Bahasa Daerah dan Strategi Adaptasi

Penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, oleh Ganjar Pranowo menonjol sebagai strategi inti dalam membangun identitas politik dan kedekatan dengan basis pemilihnya. Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar secara konsisten mengintegrasikan bahasa Jawa dalam berbagai interaksi di media sosial, baik dalam bentuk penggunaan penuh, alih kode, maupun campur kode. Ini menunjukkan upaya strategis untuk menciptakan ikatan emosional dan solidaritas dengan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis yang sama, sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitasnya.

Contoh konkret terlihat dalam interaksinya dengan pedagang di Surakarta, di mana Ganjar Pranowo menggunakan bahasa Jawa secara penuh untuk mengungkapkan kekagumannya:

“Serius kalau ini, dah. Sungguh luar biasa ini. Ini kalau seperti ini (dia) berdandan, (tetapi) tidak ada selendangnya, kan, (terus) dia pakai rambut. Wah, rasanya seperti acara pernikahan, ya, ini, ya. Menjadi pemandu pengantin, ya, bisa bagus.”

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menampilkan representasi kekuasaan dengan bertanya;

“Tak keki henpon gelem ra?”
(‘Saya kasih ponsel mau tidak?’)

Respon positif dari pedagang (“Wah. Alhamdulillah, ya, Allah. Matur nuwun, Bapak, ya Allah.”) menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam membangun impresi positif. Penggunaan bahasa Jawa secara penuh dalam konteks ini menegaskan identitas Ganjar sebagai putra daerah Jawa Tengah yang mengapresiasi kesenian dan kebudayaan lokal.

Dalam interaksi dengan korban banjir di Semarang, Ganjar Pranowo beradaptasi dengan menggunakan bahasa Jawa tingkat tutur ngoko, seperti;

“Kuat kok piye. Lo, lek ora kuat, tak tukokke. Aku, ya, konsekuen tekon.”
(‘Kuat kok gimana. Loh, kalau tidak kuat, saya belikan. Saya, ya, konsekuen tanya.’)

Bahkan, ia menawarkan bantuan konkret seperti membelikan sepatu, seragam, dan tas sekolah dengan nada santai:

“Tak tukokke sesuk esuk. Gampang, ta?”
(‘Saya belikan besok pagi. Gampang, kan?’)

Penggunaan ragam Ngoko ini memberikan kesan Ganjar sebagai pemimpin yang fleksibel, merakyat, dan mampu berdialog serta mendengarkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ini merefleksikan prinsip komunikasi homofili, di mana kesamaan gaya hidup dan latar belakang (seperti suku Jawa dan pengalaman hidup yang mungkin serupa) diperkuat untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat.

Selain penggunaan penuh, Ganjar juga mahir dalam alih kode dan campur kode. Contoh alih kode terlihat saat berinteraksi dengan dalang cilik di Surakarta, beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dengan pertanyaan seperti;

“Tenane?”
(‘Sungguh?’)
“Teng pundi nontone?”
(‘Di mana menontonnya?’)

Campur kode dijumpai dalam pidatonya saat membuka Konferwil IPNU IPPNU Jawa Tengah, ketika ia menyelipkan kata *‘wedi’* (takut) dalam kalimat Indonesia:

“Saya itu agak wedi. Agak jarang saya sambutan ada pengawalnya.”

Penggunaan kata *‘wedi’* ini tidak dimaknai harfiah sebagai rasa takut, melainkan sebagai unsur humor yang membangkitkan perasaan terhormat dan dihargai karena dikawal secara khusus. Fleksibilitas berbahasa ini merupakan strategi pencitraan untuk membangun keakraban dan mencairkan suasana, sehingga Ganjar tampil sebagai "pemimpin merakyat" yang mudah dijangkau oleh konstituennya.

b. Representasi Kekuasaan dan Strategi Kesantunan dalam Tuturan Politik

Representasi kekuasaan politisi di media sosial tidak selalu diekspresikan secara formal atau berjarak, melainkan seringkali diintegrasikan dengan strategi kesantunan. Ganjar Pranowo menunjukkan otoritasnya melalui pilihan diksi, frasa verbal, dan kalimat imperatif. Misalnya, saat mengecek pembangunan pasar di Brebes, ia menggunakan diksi imperatif seperti *‘kekke’* (berikan), *‘beresi’* (bereskan), dan *‘laporke’* (laporkan) yang ditujukan kepada pemborong. Frasa verbal seperti *‘tak tukokke’* (saya belikan) dan *‘tak keki’* (saya berikan) juga menegaskan kewenangannya sebagai pejabat yang dapat memenuhi kebutuhan warga, seperti menjanjikan kasur dan perlengkapan dapur bagi korban banjir atau bibit untuk penanggulangan banjir.

Penggunaan kalimat imperatif oleh Ganjar juga berfungsi untuk memberikan arahan dan penekanan. Dalam seminar pertambangan, ia mengimbau kepala daerah untuk tidak takut mengangkat tangan dengan ucapan;

“Lho, ora usah wedi!”
(‘Loh, tidak perlu (jangan) takut!’)

Saat memberikan paparan tentang penanganan kemiskinan ekstrem kepada kepala desa, ia menyerukan:

“Rungokne suarane rakyat!”

(‘Dengarkan suara rakyat!’)

“Percaya mbek aku!”

(‘Percayalah kepadaku!’)

Kalimat imperatif ini, meskipun menunjukkan kekuasaan, disampaikan dalam konteks membangun akuntabilitas dan pelayanan publik, yang berkontribusi pada citra positifnya sebagai pemimpin yang tegas namun merakyat.

c. Dinamika Gaya Bahasa dan Pelanggaran Kesantunan dalam Debat Politik

Debat politik, sebagai arena utama komunikasi politik, seringkali menjadi cerminan dari beragam gaya bahasa dan, sayangnya, pelanggaran kesantunan. Analisis terhadap debat pertama Pilpres 2024 menunjukkan adanya pola pelanggaran maksim kesantunan. Prabowo Subianto, misalnya, menanggapi Anies Baswedan dengan pernyataan yang dinilai melanggar maksim kebijaksanaan:

“Mas Anis, Mas Anis. Saya... saya berpendapat, eh, Mas Anis ini agak berlebihan. Mas Anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini Mas Anis dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak ...”

Ucapan ini dianggap merugikan mitra tutur karena menyinggung dan membuka kembali isu masa lalu yang sensitif. Pelanggaran maksim penerimaan juga terjadi ketika Prabowo merespons pertanyaan Ganjar Pranowo tentang hilangnya 13 aktivis:

“Loh kok dibilang saya tidak tegas. Saya tegas akan menegakkan Hak Asasi Manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya, itu tendensius dan wakil bapak yang mengurus ini selama ini...”

Pernyataan ini menunjukkan pembelaan diri dan upaya mengalihkan tanggung jawab, yang dinilai tidak santun karena memaksimalkan keuntungan diri sendiri.

Dalam debat calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD juga menunjukkan pelanggaran maksim kemurahan. Saat merespons Gibran, ia mengucapkan;

“Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila, ini ngarang-ngarang gak karuan mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya, begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu recehan.”

Ucapan ini dinilai tidak menghormati lawan bicara dan meremehkan pertanyaan yang diajukan, bertentangan dengan prinsip memaksimalkan rasa hormat. Selain itu, pelanggaran maksim kerendahan hati juga terlihat ketika Prabowo membanggakan diri dengan mengatakan;

“Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.”

Tindakan ini melanggar prinsip meminimalkan penghormatan diri sendiri.

Penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam debat paslon pilkada DKI Jakarta 2017 para paslon ditemukan tuturan berjumlah 4 salah satu contohnya;

“Tadi, kan, bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah, terus (katanya) rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, bapak-ibu mau jual rumah Rp300 juta, ini enggak usah bunga, ini (uang muka) sama pemerintah. Kalau (harga rumah) Rp350 juta kali satu juta rumah (sama dengan) Rp350 triliun. Itu uang dari mana? Ngomong gampang: banyak yang mau jual rumah, tapi enggak ada duit buat beli.”

Hal itu terlihat dari kalimat *“Itu uang dari mana? Ngomong gampang: banyak yang mau jual rumah, tapi enggak ada duit buat beli.”* Jika dikaitkan dengan konteks, pernyataan tersebut disampaikan oleh paslon dua ketika menanggapi program perumahan dengan dp rendah yang diusung paslon lain. Pernyataan tersebut dimaknai kasar karena akan menyakiti hati lawan tutur atau pendengar tuturannya. Selain itu, dari pernyataan tersebut juga akan mengecilkan hati masyarakat yang sangat menginginkan rumah dengan harga murah.

Kesalahan utama dalam kutipan tersebut adalah penggunaan bahasa yang tidak santun, yaitu dengan memakai sarkasme yang dapat merendahkan lawan bicara dan menyinggung perasaan masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, seharusnya para tokoh menggunakan bahasa yang sopan, empatik, dan membangun, bukan bahasa yang kasar atau merendahkan.

d. Ekspresi Bahasa di Media Sosial: Alat Pencitraan

Di sisi lain, media sosial juga dimanfaatkan secara strategis untuk membangun citra politik (personal branding). Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah contoh yang jelas. Melalui akun Instagramnya, AHY secara aktif mengabarkan kegiatan sosial, keluarga, dan politiknya dalam bentuk foto dan video. Personal branding yang ia tampilkan adalah sosok politisi muda, rapi, karismatik, tampan, dan berwibawa, yang bertujuan untuk dikagumi oleh generasi muda. Penggunaan gestur tubuh, seperti tangan mengepal untuk patriotisme dan ketegasan, tangan terbuka untuk penerimaan dan keramahan, serta tangan di dada untuk menunjukkan kejujuran, merupakan bagian dari pembingkai citra (framing) AHY. Tujuannya adalah menampilkan nilai-nilai kebangsaan, ketegasan, nasionalisme, dan humanisme.

Prabowo Subianto juga menerapkan strategi adaptasi komunikasi di media sosial untuk memperbaiki citra publiknya. Dalam upaya mengatasi persepsi negatif masa lalu, ia aktif berpartisipasi dalam podcast, seminar, dan berinteraksi dengan influencer muda. Pergeseran gaya komunikasinya menjadi lebih terbuka dan inklusif, terutama menargetkan generasi Z dan milenial, terbukti efektif. Respons positif dari warganet, termasuk munculnya tagar seperti *#AllinPrabowo*, menunjukkan keberhasilan strategi ini dalam membangun apresiasi dan dukungan. Kehadiran Prabowo di acara seperti Mata Najwa, di mana ia menampilkan sisi humoris, menjadi viral dan secara signifikan membantu memperbaiki citranya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi arena krusial dalam komunikasi politik Indonesia. Meskipun menawarkan peluang besar untuk personal branding dan membangun kedekatan dengan pemilih melalui adaptasi bahasa dan gaya komunikasi (seperti penggunaan bahasa Jawa oleh Ganjar Pranowo atau citra humanis AHY), platform ini juga rentan terhadap pelanggaran kesantunan berbahasa. Konflik dalam debat politik dan penggunaan sarkasme di kalangan warganet menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga etika komunikasi di ruang digital. Ini menggarisbawahi urgensi bagi para aktor politik dan masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial demi membangun budaya komunikasi yang lebih

sehat dan konstruktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan tema kesantunan berbahasa tokoh politik Indonesia dalam berkomunikasi di jejaring sosial digital dapat diambil kesimpulan;

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang strategis sekaligus kompleks dalam praktik komunikasi politik tokoh-tokoh Indonesia.
2. Penggunaan bahasa, baik verbal maupun nonverbal, digunakan tidak hanya untuk menyampaikan pesan politik tetapi juga untuk membentuk citra dan identitas politik. Tokoh seperti Ganjar Pranowo menggunakan bahasa daerah, alih kode, dan gaya tutur santai sebagai strategi kedekatan dengan publik, sementara figur lain seperti AHY dan Prabowo memanfaatkan media sosial untuk membingkai citra personal yang positif.
3. Dalam konteks debat politik, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesantunan berbahasa, seperti pelanggaran maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesetujuan. Hal ini menandakan bahwa etika komunikasi di ruang digital masih menjadi tantangan serius bagi aktor politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, P., & Wardani, O. P. (2025). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Debat Perdana Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 13(1), 364-371.
- Aziz, A. (2021). Kesantunan Berbahasa Para Pasangan Calon dalam Debat Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Kajian Sosiopragmatik. *Sebatik*, 25(1), 154-172.
- Mislikhah, S. (2020). Kesantunan berbahasa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 285-296.
- Setiyaningsih, R. W., & Suharyo. (2025). Ketidaksantunan Berbahasa Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Debat Akbar Pemilu 2024 (Kajian Pragmatik). *Wicara*, 4(1), 11-18.
- Julianto Rizky, A. T., Harris, E. A., & Soekarno, Z. P. (2023). Analisis Komunikasi Politik Prabowo Subianto Di Media Sosial Menjelang Kontestasi Pemilihan Presiden 2024. *Prosiding Seminar Nasional UNESA 2023*, 673-680.
- Musyawir. (2024). Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Wacana Politik pada Media Sosial (Kajian Sosiopragmatik). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4045-4057.
- Indra, D., & Wahid, U. (2021). Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 228-239.
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Azizah, I. N. (2024). Strategi Kesantunan Berbahasa pada Sesi Wawancara antara Ridwan Kamil dengan Pinter Politik TV. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMNALISA) Tahun 2024*, 56-64.
- Alam, S. (2021). Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik. *AVANT GARDE*, Vol. 09 No. 01, 68-78.
- Ambarsari, F. C., Gizka, A. F., Zerlinda, N., Putri, N. S. M., Giyanti, M. E. P., & Arum, D. P. (2024). Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik: Variasi Gaya Bahasa Calon Presiden Dalam Debat Pertama Pilpres 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 5702-5720.
- Prayitno, H. J., Kusmanto, H., Nasucha, Y., Rahmawati, L. E., Jamaluddin, N., Samsuddin, & Ilma, A. A. (2019). The Politeness Comments on The Indonesian President Jokowi Instagram Official Account Viewed From Politico Pragmatics and The Character Education Orientation in The Disruption Era. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 1(2), 52-71.
- Nainggolan, E. T., Godliebe, & Hadi, W. (2024). Analisis Penggunaan Bahasa dalam

- Propaganda Politik di Media Sosial. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 1(3), 1-8.
- Fadlilah, A., Utari, R., & Iskandar, D. (2023). Bahasa dan Identitas Kelompok dalam Pernyataan Tokoh Politik: Sebuah Studi Sociolinguistik. *SASDAYA Gadjah Mada Journal of Humanities*, 7(2).
- Huda, R. I., Fauziah, N., Halimatussadiyah, S., & Gumelar, R. G. (2022). Komunikasi Politik Empati dan Homofili Ganjar Pranowo. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 472–483.
- Pratiwi, F. N. (2024). Penggunaan Bahasa Jawa Sebagai Simbol Identitas Politik Ganjar Pranowo di Media Sosial. *Linguistik Indonesia*, 42(1), 157–183.
- Simatupang, L., & Gozali. (2021). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Status Facebook Presiden Joko Widodo. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) 2021*, 750–762.
- Yanda, D. P. (2017). Kesantunan Berbahasa Anas Urbaningrum Pasca Jadi Tersangka KPK Dalam Kasus Hambalang. *Jurnal Gramatika*, 3(2), 119-130.
- Yudhoyono, L. P. (2023). Mediatisasi Politik dan Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono melalui Media Sosial Instagram. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1269–1279.
- Mahmudi, A. G., Irawati, L., & Soleh, D. R. (2021). Kesantunan Berbahasa Siswa dalam Berkomunikasi dengan Guru (Kajian Pragmatik). *Jurnal Deiksis*, 13(2), 98–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/deiksis.v13i2.6169>
- Maisarah, M. (2013). Aplikasi Komunikasi Non-Verbal Di Dalam Kelas. *Educate*, 2(2).
- Nasution, J. (2019). Komunikasi dalam Program Talk Show di Televisi: Kajian Perbandingan Komunikasi Talk Show dan Komunikasi Langsung. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 15(2), 212–219. <https://doi.org/10.26499/mm.v15i2.1174>
- Nasution, J., Pujiono, M., & Iqbal, M. (2023). Verbal Taboos in Acehnese Language: Meaning, Function, and Euphemism. *Randwick International of Education and Linguistics Science Journal*, 4(1), 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.47175/rielsj.v4i1.642>
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(3), 29–37. <http://pusdikrapublishing.com/index.php/jrss>